

MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024



TAHUN 2024

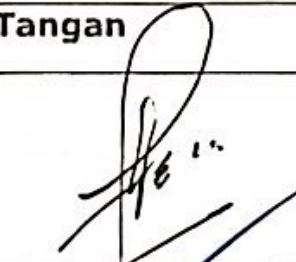

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan I Tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U4 Dengan Nilai 1145; 2. U5 Dengan Nilai 1151; 3. U7 Dengan Nilai 1154; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Unsur Transparansi Biaya (U4)	<p>> Unsur Hadiah merupakan Unsur ke-4 dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat Informasi mengenai tariff/biaya pelayanan pada website Pengadilan Negeri Palembang; ➤ Petugas PTSP memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait biaya/tarif resmi yang akan dikenakan pada setiap pelayanan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisis dari 303 responden terdapat nilai yaitu : Tidak Pernah sebanyak 1 responden, Jarang sebanyak 2 responden, Sering sebanyak 51 Responden, dan Selalu sebanyak 249 Responden ; 	
2	Unsur Biaya Tambahan (U5)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5 dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? - Hasil analisis dari 303 responden terdapat nilai : Tidak Pernah sebanyak 1 Responden, Jarang sebanyak 1 Responden Sering sebanyak 56 Responden, dan Selalu sebanyak 245 Responden; 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan pembinaan dan brifing setiap pagi oleh Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk mengarahkan petugas PTSP untuk tidak meminta imbalan apapun dan membayar sesuai tarif resmi;

3	Unsur Transparasi Pembayaran (U7)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-7 dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) - Hasil analisis dari 303 responden terdapat nilai Tidak Pernah sebanyak 1 Responden, Jarang sebanyak 3 Responden Sering sebanyak 58 Responden, dan Selalu sebanyak 241 Responden ; 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Petugas selalu memberikan bukti transaksi keuangan / pembayaran berupa kwitansi setelah proses pembayaran dilakukan;
---	--	---	---

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan Ke-I Tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	M. TEGUH, SE., SH., MH	Panitera	

The screenshot shows the website for the Special Class 1A of the Palembang District Court. The header includes the court's name, address, and contact information. A navigation menu is located below the header. The main content area features a large banner for 'Zona Integritas Menuju WBK/WBBM' and a section for 'LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU' which includes a sub-section for 'PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA DAN BIAYA PERKARA'. To the right, there is a 'ZONA INTEGRITAS' graphic with three pillars: 'KOMITMEN', 'BEBAS KORUPSI', and 'PELAYANAN PRIMA'. The 'PELAYANAN PRIMA' section lists the court's commitment to public service quality and satisfaction.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang
Telpon/fax (0711) 313555 - 363310 Email : pnpalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia ▾
search...

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pimpinan & seluruh jajaran pada Pengadilan Negeri Palembang berkorupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Peraturan dan Kebijakan Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Predeo) Posbankum

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA DAN BIAYA PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara Biaya Perkara

ZONA INTEGRITAS

KOMITMEN

Pimpinan dan Seluruh Jajarannya Mempunyai Komitmen Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, Khususnya Dalam Hal Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

BEBAS KORUPSI

Terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- Bebas dari Korupsi
- Bebas dari Gratifikasi
- Bebas dari Pungutan Liar (Pungli)

PELAYANAN PRIMA

Terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

BIAYA PERKARA PADA WEBSITE

Sign in

Standar Pelayanan

https://pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/ptsp/standar-pelayanan

Menu Tentang Pengadilan

- PROFIL PENGADILAN
- Sistem Pengelolaan Pengadilan
- Standar Pelayanan**
- E-Learning
- Rencana Strategis
- Rencana Kerja Anggaran
- Pengawasan dan Kode Etik Hakim
- Kegiatan Pengadilan
- Daftar Aset dan Inventaris
- Rencana Umum Pengadilan (RUP)
- Profil Personil/Pegawai

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang

DITULIS OLEH ADMIN ON 27 SEPTEMBER 2017. POSTED IN PENGUMUMAN

Cetak E-mail

Standar Pelayanan Hukum 2023.pdf

Standar Pelayanan Pidana 2023.pdf

Standar Pelayanan Tipikor 2023.pdf

Screen Reader

Sign in

Standar Pelayanan Hukum 2023

https://pn-palembang.go.id/images/Berita/standar%20pelayanan%202022/2023_SP/Standar%20Pelayanan%20Hukum%202023.pdf

9 of 37

1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Pemberian formulir permohonan pendaftaran surat kuasa
3. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
4. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan
5. Memberikan produk pelayanan surat kuasa yang telah dilegalisir

G. SARANA PRASARANA

Komputer
Kertas formulir

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Petugas Meja Informasi dan Pelaksana Pelayanan Publik yang telah mendapat pembinaan

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

1 jam setelah dilakukan pembayaran

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa Khusus
2. Kartu Tanda Anggota Advokat
3. Berita Acara Sumpah Advokat

M. BIAYA ATAU TARIF

Pencatat Surat Kuasa ----- Rp 10.000,00

STANDAR PELAYANAN




PETUGAS PTSP MEMBERIKAN PENJELASAN TERKAIT BIAYA/TARIF RESMI

Point 2



BRIEFING PETUGAS PTSP

Point 3

**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA
KORUPSI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**
Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang
Telp (0711) 363310-313555 Fax : (0711)313555 Website : www.pn-palembang.go.id
Email : pn-palembang@gmail.com / pn-palembang@yahoo.com

TANDA TERIMA

Telah terima dari : M. Andi Yulizar
Uang sebesar : Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Guna membayar : Pendaftaran Surat Kuasa Akte Notaris Legalisir
 Salinan Putusan Surat Keterangan Warmerking
 Pengesahan Akta dibawah tangan Lain-lain.....

Dengan perincian :

<input checked="" type="checkbox"/> PNPB	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Photocopy @ lembar	: Rp. 300,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-	<input type="checkbox"/> Sampul	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Ongkps Photocopy	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Penyerahan Salinan	: Rp. 500,-	<input type="checkbox"/> Biaya Jilid	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Putusan @ lembar	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/>	: Rp.
<input type="checkbox"/> Leges		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> @ Putusan/Penetapan		<input type="checkbox"/>	

KASIR
[Signature]
(.....)
NIP.

Palembang, 3 - 1 - 2024.
Petugas Meja Informasi
Hukum
[Signature]
(.....)

Agama

BUKTI BAYAR BERUPA KWITANSI